

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018-2022**

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Kartika Wulandari

312131626

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JANUARI 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018 - 2022

Dipersiapkan dan disusun oleh:

KARTIKA WULANDARI

Nomor Induk Mahasiswa: 312131626

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar



Pembimbing

Manggar Wulan Kusuma, SE., M.Si., Ak.

Penguji

Rosmawan Wahyu Anggoro, Dr., MSA., Ak., CA.

Yogyakarta, 25 Januari 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018-2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja periode 2018-2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari bagian BPKPAD Kabupaten Sukoharjo berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2018-2022. Setelah melakukan analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Analisis varians pendapatan daerah menunjukkan bahwa penerimaan PAD terus bertambah terutama dalam hal pajak daerah, (2) Pertumbuhan pendapatan daerah ditahun 2020 dan 2022 mengalami pertumbuhan negatif sebab dari adanya pandemi, (3) Derajat desentralisasi menunjukkan peningkatan dan berada pada kategori sedang, (4) Rasio ketergantungan masih termasuk kategori sangat tinggi namun nominalnya terus berkurang, (5) Efektivitas penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan terbanyak ditahun 2022, sedangkan berdasarkan efisiensi menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo telah

efisien dalam memanfaatkan upah pungut karena tidak melebihi 5%, (6) Varians dan efisiensi belanja daerah menunjukkan penyerapan yang semakin baik dan dalam penggunaan anggaran belanja tidak ada yang melebihi realisasi. (7) Pertumbuhan belanja daerah terjadi pengurangan ditahun 2020 khususnya belanja modal karena adanya pengentasan pandemi, (8) Derajat BUMD menunjukkan bahwa perusahaan daerah berkontribusi dalam pendapatan daerah, (9) Rasio keserasian menunjukkan bahwa belanja operasi dan belanja modal setiap tahun porsinya rata-rata meningkat, belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal, belanja modal berfluktuatif karena adanya porsi infrastruktur yang berbeda setiap tahunnya. Secara keseluruhan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo secara umum dikatakan baik

Kata kunci: Kinerja keuangan, Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong kegiatan ekonomi serta merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dikenal sebagai pembangunan ekonomi daerah (Tumangkeng, 2018).

Penerapan konsep otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokal, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. APBD merupakan dokumen perencanaan dan pengendalian keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah guna mengatur kebutuhan masyarakat setempat.

Evaluasi kinerja keuangan daerah terhadap APBD dapat dilakukan melalui perbandingan pencapaian antara satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengungkapkan tren yang muncul. Salah satu parameter dalam menilai kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Otonomi daerah, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah prinsip yang memberikan daerah otonom hak, kewenangan, dan tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya secara independen, sesuai dengan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan merujuk pada riset yang dilakukan oleh (Kusuma, 2014) dengan menggunakan Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, dan Analisis Tren Keuangan Daerah menghasilkan bahwa Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya mandiri, karena masih mengandalkan dana dari pihak eksternal untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu penulis bermaksud menguji ulang rasio keuangan berdasarkan data APBD Sukoharjo. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Rahmayati, 2016) dengan menggunakan Rasio DCSR, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, dan Rasio Keserasian menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal serta penggunaan dananya masih belum berimbang. Kesamaan dalam kedua penelitian ini adalah bahwa setiap peneliti hanya memanfaatkan lima rasio keuangan sebagai variabel penelitian mereka.

Menurut saran yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya, Kabupaten Sukoharjo sebaiknya fokus pada peningkatan pembangunan infrastruktur daerah. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh (Divianta, 2023) dan dilaporkan oleh Liputan 6, Kabupaten Sukoharjo sedang gencar melaksanakan 10 pembangunan proyek strategis, di mana tiga di antaranya telah mencapai tahap pelaksanaan. Upaya ini sejalan dengan konsep otonomi daerah, di mana manajemen keuangan daerah yang efisien dan efektif memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dilakukan penelitian dengan menambahkan serta menggunakan beberapa variabel di antaranya Analisis Varians Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Derajat Kontribusi BUMD, Analisis Varians dan Efisiensi Belanja Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah, dan Analisis Keserasian Belanja Daerah.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Sebagaimana dinyatakan oleh Jensen & Meckling (1976), keterkaitan agensi merujuk pada perjanjian di antara *principal* dan *agent*, di mana beberapa kewenangan pengambilan keputusan didelegasikan kepada agen. Teori agensi dapat digunakan di sektor publik. Pemerintah dan masyarakat, atau pemerintah daerah dan pemerintah pusat, memiliki hubungan agensi dalam negara demokratis. Pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat, tetapi mereka juga bertanggung jawab kepada pemerintah pusat.

Hubungan antara Keagenan dan Penggunaan Anggaran Daerah di Indonesia

Regulasi hukum dalam administrasi pemerintahan secara tidak langsung adalah sebuah perjanjian antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Dokumen tersebut menguraikan tanggung jawab dan hak setiap anggota pemerintah. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Indonesia mencakup provinsi, kabupaten, dan kota, dan berfungsi sebagai landasan untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat (Zelmiyanti, 2016).

Teori Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009:123) mengindikasikan bahwa dalam evaluasi kinerja organisasi sektor publik, informasi yang dipertimbangkan mencakup informasi yang tidak berkaitan dengan keuangan dan keuangan. Mardiasmo (2009:133) menyatakan bahwa implementasi simultan dari metrik efisiensi dan efektivitas sangat penting. Sebabnya adalah bahwa, di satu sisi, aktivitas dapat dilakukan dengan hemat dan efisien tetapi tidak menghasilkan *output* yang diharapkan; di sisi lain, program dapat mencapai tujuannya dengan efektif tetapi biayanya tidak ekonomis dan efisien. Suatu program dianggap sebagai *cost effectiveness* jika mencapai efektivitas dan efisiensi secara biaya. Indikator kinerja biaya menggabungkan data tentang efisiensi dan efektivitas. Ini memberikan ukuran yang signifikan untuk kinerja sektor publik dan sebanding dengan penilaian pelayanan masyarakat.

Kinerja

Menurut Afandi (2018) Kinerja adalah konsekuensi yang dapat dihasilkan oleh individu atau kelompok individu dalam lingkungan bisnis sebanding dengan tanggung jawab serta tugas mereka dalam hal pencapaian tujuan organisasi tanpa melibatkan pelanggaran hukum,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tindakan ilegal, dan selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ketepatan dan efektivitas dalam menjalankan peraturan keuangan yang berlaku tercermin dalam kinerja keuangan yang baik. Fahmi (2018:142) memberikan definisi, terdapat lima langkah umum yang digunakan dalam melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan. Langkah-langkah tersebut mencakup pemeriksaan laporan keuangan, implementasi metode perhitungan, perbandingan hasil perhitungan, penafsiran masalah yang teridentifikasi, dan upaya identifikasi serta penyediaan solusi terhadap masalah yang muncul.

Kinerja keuangan daerah memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Kinerja keuangan daerah merupakan evaluasi sejauh mana pemerintah daerah berhasil mengelola sumber daya finansialnya guna mencapai tujuan pembangunan. Indikator utama kinerja keuangan daerah melibatkan pendapatan, belanja, hutang daerah, bersama dengan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya (D.W. Saputra, 2023). Dalam konteks pemerintah daerah, kinerja keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai tingkat pengelolaan keuangan atau pencapaian hasil kerja sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang diukur selama periode anggaran (Hakim, 2018).

Anggaran

Peran anggaran sangat signifikan dalam suatu organisasi, berfungsi sebagai perencanaan keuangan yang

disusun secara terstruktur. Anggaran merupakan dokumen tertulis yang merinci secara kuantitatif mengenai kegiatan organisasi selama periode tertentu, umumnya disajikan dalam mata uang (Meiliana, 2022).

Sementara itu dalam buku Mardiasmo (2009:11) mengatakan, manajemen keuangan dan pengelolaan anggaran di daerah merupakan aspek krusial yang membutuhkan pengaturan yang cermat dalam konteks pemerintahan daerah. Anggaran pemerintah daerah berfungsi sebagai alat kebijakan utama, APBD, yang bertugas meningkatkan kapasitas dan efisiensi pemerintah daerah. Anggaran daerah berperan untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran, menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta berfungsi sebagai wewenang pengeluaran di masa depan. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur aktivitas di unit kerja dan sebagai standar evaluasi kinerja.

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2002, APBD merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan kemakmuran rakyat di suatu wilayah. APBD mencerminkan kebutuhan masyarakat seiring dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya ekonomi lokal. Menurut Lasminingsih (2004:223), APBD adalah perencanaan keuangan tahunan yang diatur oleh peraturan daerah. APBD berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan pelayanan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

publik dan kesejahteraan sosial, sebagaimana prinsip otonomi daerah. Tambahan, APBD juga berperan sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait jumlah dan alokasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dibuat oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan DPRD. Dengan cara ini, APBD diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhitungkan kondisi dan situasi khusus yang ada di daerah tersebut. (Wijaya, 2022).

Kinerja Keuangan APBD

Kinerja keuangan daerah didefinisikan sebagai tingkat kinerja atau pengelolaan sektor keuangan, termasuk penyusunan dan pelaksanaan anggaran, mencapai tingkat yang diukur dengan indikator yang dibuat oleh peraturan yang berlaku pada saat jangka waktu anggaran (Rakadewa, 2022). Pengukuran kinerja ini dalam penelitian melibatkan gabungan evaluasi perbandingan laporan keuangan, peninjauan tren atau kecenderungan, dan pemeriksaan rasio. Kinerja APBD menentukan penilaian ini.

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, buku Mahmudi (2016), ada tiga cara yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan APBD:

A. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan ini secara keseluruhan dievaluasi menurut perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggarannya. Indikator kinerja dianggap positif jika realisasi melebihi tujuan atau anggaran yang ditentukan. Evaluasi

pendapatan daerah dan kinerja keuangan yang optimal bukan saja mempertimbangkan apakah jumlah pendapatan yang dihasilkan melebihi sasaran atau tidak, namun juga mempertimbangkan elemen penerimaan lain yang memiliki dampak yang signifikan.

Berdasarkan realisasi anggaran, metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis kinerja keuangan pendapatan daerah adalah:

1) Analisis Varians Pendapatan Daerah

Melibatkan perhitungan variasi antara pendapatan yang didapat dan jumlah dana yang telah dialokasikan. Informasi yang diperoleh dari selisih anggaran ini berguna untuk mengevaluasi kinerja pendapatan. Perencanaan pendapatan mencerminkan standar minimum tindakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah. Ketika pendapatan yang terkumpul melebihi anggaran, prestasi pendapatan pemerintah daerah dianggap positif. Sebaliknya, jika realisasi pendapatan berada di bawah anggaran atau tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, performa tersebut dianggap kurang memuaskan bahkan kurang baik. Pendapatan seharusnya memenuhi atau bahkan melampaui target anggaran. Perbedaan positif antara pendapatan aktual dan anggaran disebut sebagai perbedaan yang menguntungkan (*favourable variance*), sementara perubahan yang negatif juga disebut sebagai perubahan yang tidak diharapkan atau tidak menguntungkan (*unfavourable variance*).

2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Memiliki manfaat guna mengevaluasi hasil kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah daerah selama tahun anggaran yang dimaksud atau dalam suatu periode anggaran tertentu, apakah mengalami peningkatan pertumbuhan yang positif atau sebaliknya, penurunan pertumbuhan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Idealnya, pertumbuhan pendapatan seharusnya positif dan mengalami kecenderungan peningkatan dari periode anggaran sebelumnya, mencerminkan peningkatan kinerja keuangan. Namun, apabila sebaliknya, yaitu pertumbuhan negatif atau tidak memenuhi target, ini menunjukkan penurunan kinerja keuangan dari pendapatan daerah. Tingkat inflasi dapat diseimbangkan dengan pertumbuhan pendapatan daerah yang diharapkan. Di lain pertimbangan akan faktor inflasi, menetapkan sasaran pertumbuhan pendapatan sebaiknya memperhitungkan prediksi anggaran lainnya, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak, dan faktor-faktor serupa.

B. Analisis Rasio Keuangan

1) Rasio Derajat Desentralisasi

Menurut penelitian (Halim, 2020), rasio ini berperan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan serta peningkatan optimalisasi pendapatan. Kemampuan daerah untuk menjalankan proses desentralisasi dapat dilihat dari tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), kapabilitas daerah

dalam melaksanakan desentralisasi juga semakin besar. Rasio ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah bisa menghasilkan pendapatan sendiri dari berbagai kekayaan yang dimiliki oleh wilayah mereka. Dan juga rasio ini mengukur tingkat desentralisasi dengan menghitung bagian PAD dari pendapatan daerah. Perbedaan antara Pendapatan Asli Daerah dan total penerimaan digunakan untuk menentukan tingkat desentralisasi. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan desentralisasi.

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Dalam buku (Mahmudi, 2016), rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat meningkat. Ketika rasio ini semakin tinggi, itu dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan kemandirian keuangan dan tingginya ketergantungan pada pihak lain dalam pengelolaan pembangunan daerah. Sebaliknya, jika rasio ini semakin kecil, itu mengindikasikan pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk mengelola dan memajukan wilayahnya sendiri menggunakan sumber daya yang dimilikinya.

3) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Berdasarkan penelitian (Puspitasari & Rohman, 2014), sejauh mana pemerintah daerah dapat memperoleh

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak daerah sesuai dengan target penerimaan ditunjukkan oleh rasio efektivitas pajak daerah. Jika setidaknya mencapai satu atau 100%, rasio ini dianggap baik. Untuk menghitung rasio ini, diperlukan data yang berkaitan dengan biaya pemungutan pajak daerah. Jika rasionya kurang dari sepuluh persen, kinerja keuangan pemerintah daerah sehubungan dengan pengumpulan pajak daerah dianggap efisien. Sebagai referensi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, biaya yang diperlukan untuk membayar pajak dan retribusi daerah tidak boleh melebihi 5% dari realisasi pajak dan retribusi daerah.

4) Derajat Kontribusi BUMD
BUMD, badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah secara keseluruhan atau sebagian besar, menurut Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017, perhitungan ini berfungsi memahami sejauh mana kontribusi perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan keseluruhan daerah.

C. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1) Analisis Varians dan Efisiensi Belanja Daerah

Analisis varians dan efisiensi belanja daerah adalah evaluasi perbedaan antara realisasi belanja dan alokasi anggaran yang telah direncanakan untuk pemangku kepentingan guna menilai sejauh mana perbedaan antara anggaran belanja dan pelaksanaannya, yang diungkapkan dalam bentuk angka nominal dan persentase.

2) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Bertujuan menilai apakah pertumbuhan pada belanja setiap tahun berubah naik atau turun.

3) Analisis Keceramasan Belanja Daerah

Mencerminkan cara pemerintah daerah mengalokasikan dana yang dimiliki secara efisien terhadap dua komponen belanja utama, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Diukur dengan membandingkan analisis belanja modal dan operasi terhadap total belanja.

METODE DAN TEKNIK ANALISIS

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk merangkum dan menjelaskan data numerik sehingga lebih mudah untuk dipahami. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan metode analisis data ini:

1. Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui situs web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo dan kantor BPKPAD Kabupaten Sukoharjo.
2. Analisis kinerja keuangan pendapatan daerah, rasio keuangan, dan kinerja keuangan belanja daerah digunakan untuk menghitung data.
3. Memberi pemahaman yang akurat mengenai bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan menyajikan data yang dihasilkan dari perhitungan yang dimaksud. Analisis kinerja keuangan pendapatan daerah, rasio keuangan, dan kinerja keuangan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

belanja daerah digunakan untuk melakukan analisis.

Penghitungan masing-masing variabel pada penelitian dengan menggunakan rumus-rumus berikut ini:

1. Analisis Varians Pendapatan Daerah

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{realisasi pendapatan tahun } t}{\text{anggaran pendapatan tahun } t} \times 100\%$$

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

$$\text{Analisis Pertumbuhan} = \frac{\text{pendapatan tahun } t - \text{pendapatan tahun } t-1}{\text{pendapatan tahun } t-1} \times 100\%$$

3. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{pendapatan transfer}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{realisasi pendapatan pajak daerah}}{\text{target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{biaya pemerolehan pajak daerah}}{\text{realisasi pajak daerah}} \times 100\%$$

6. Derajat Kontribusi BUMD

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{pendapatan bagian laba BUMD}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

7. Analisis Varians dan Efisiensi Belanja Daerah

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{realisasi belanja tahun } t}{\text{anggaran belanja tahun } t} \times 100\%$$

8. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

$$\text{Pertumbuhan Tahun } t = \frac{\text{realisasi belanja tahun } t - \text{realisasi belanja tahun } t-1}{\text{realisasi pendapatan tahun } t-1} \times 100\%$$

9. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{realisasi belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}}$$

Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{realisasi belanja modal}}{\text{total belanja daerah}}$$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2022 terdiri dari:

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah biasanya digambarkan dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan pendapatan yang berhasil terkumpul. Kinerja keuangan pendapatan daerah dianggap baik jika pendapatan yang terkumpul melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, namun, penting untuk mempertimbangkan berbagai variabel yang memengaruhi pendapatan, termasuk Analisa Varians Pendapatan Daerah, Analisa Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Analisa Rasio Keuangan yang meliputi Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Derajat Kontribusi BUMD.

1. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah mengumpulkan rincian tentang perbedaan antara pendapatan yang dihasilkan dan anggaran yang dialokasikan. Dari varians ini, kinerja pemerintah daerah dapat dinilai, dan kinerja tersebut dianggap baik jika berhasil melebihi target anggaran (Mahmudi, 2016).

Hasil perhitungan kinerja keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2018–2022 tergolong baik karena realisasinya melebihi target

yang telah ditetapkan dan dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya mengalami selisih lebih. Varians pendapatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Variasi tertinggi sebesar 105.23% pada tahun 2022 dan varians terendah sebesar 103.47% pada tahun 2018 masing-masing menghasilkan rata-rata varians pendapatan Kabupaten Sukoharjo sebesar 104.42%. Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo. Kepala (BKD) Kabupaten Sukoharjo mengatakan bahwa semua jenis pajak daerah tahun 2022 telah meningkat dari target yang ditetapkan (Putri, 2024).

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah dapat digunakan untuk menentukan apakah kinerja APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan pada tahun atau jangka waktu tertentu.

Pendapatan Kabupaten Sukoharjo meningkat pada tahun anggaran 2018-2019 sebesar 4.29% dan menurun di tahun 2019-2020 menjadi bernilai negatif sebesar -4.82%. Tahun berikutnya mengalami peningkatan lagi menjadi 3.88% dan mengalami penurunan lagi di tahun 2021-2022 menjadi -4.94%. Ini membuktikan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah di tahun 2020 dan 2022 menurun. Selama dua tahun terakhir, sektor pariwisata tidak menyumbangkan PAD kepada Pemerintah Daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kabupaten Sukoharjo. Sejak pandemi muncul pada Maret 2020, semua tempat wisata yang dikelola ditutup. Heri Prasetyo, Plt Kasi Pariwisata Disdikbud Sukoharjo, mengatakan bahwa hal tersebut memiliki dampak terhadap PAD pariwisata karena harus dinolkan, meskipun penyebaran *COVID-19* di Sukoharjo sudah dapat dikontrol, kondisi tanpa PAD dari sektor pariwisata juga akan terjadi pada tahun 2022 sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan pendapatan di tahun 2020 dan 2022 (Mantovani, 2024). Sementara itu pertumbuhan di tahun 2021 didasari oleh meningkatnya Lain-Lain PAD yang Sah, terutama pada bagian Hasil Penjualan Barang Milik Daerah dan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

Analisis Rasio Keuangan

1. Derajat Desentralisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total penerimaan daerah untuk menentukan derajat desentralisasi. Jumlah PAD yang lebih besar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan desentralisasi.

Berdasar perhitungan, tahun 2018 hingga 2021 Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1.11%, ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan dalam penyelenggaraan desentralisasi. Kenaikan ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan meningkat sejalan dengan bertambahnya pendapatan asli daerah. Tingkat desentralisasi yang

berasal dari Tim Litbang Depdagri, menyimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat dianggap sedang dalam hal memobilisasi pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah selama lima tahun anggaran.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Jika rasio ketergantungan keuangan mereka di bawah 20% maka tergolong rendah.

Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2018 hingga 2022 seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.5 mengalami penurunan pada nominal pendapatan transfer. Rasio ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo masuk ke dalam kategori sangat tinggi, menurut hasil analisis terhadap rata-rata, rasio ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2.2 dari Tim Litbang Depdagri, meskipun masih tergolong sangat tinggi namun berkurangnya jumlah pendapatan transfer yang diterima memiliki artian bahwa semakin sedikit ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan dari pemerintah pusat.

3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

a. Pajak Daerah

Definisi Pajak daerah menurut UU No. 01 Tahun 2022 merupakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh individu maupun organisasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan tujuannya adalah untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan serta pengembangan wilayah daerah. Tidak ada kompensasi langsung yang diberikan.

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektivitas Pajak Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam hal pengumpulan pajak daerah. Jika rasio tersebut mencapai setidaknya 100%, dianggap memadai. Sementara itu, rasio efisiensi pajak dianggap efisien jika kurang dari 10%, menurut Pasal 76 Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001.

Pajak daerah Kabupaten Sukoharjo masuk ke dalam kategori sangat efisien dari tahun 2018–2022, menurut tabel 4.6. Tahun 2020 memiliki rasio efektivitas tertinggi dengan 140.43%, dan untuk realisasi, tahun 2022 memiliki nilai realisasi tertinggi selama lima tahun terakhir, dengan Rp286.451.988.069. Penerimaan pajak daerah tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya saat pandemi. Beberapa sektor yang mengalami kenaikan di antaranya perhotelan, hiburan, restoran, PBBP2, dan BPHTB. Meskipun tahun 2020 memiliki nilai realisasi terendah kedua, tetapi rasio efektivitasnya tertinggi, karena tahun itu berhasil melampaui target lebih tinggi dari yang direncanakan dan juga karena adanya pengurangan pada target penerimaan pajak daerah mengingat

pada tahun tersebut adalah mulainya tahun pandemi sehingga ada beberapa sektor yang targetnya dikurangi atau bahkan dibebaskan (Wicaksono, 2024). Penurunan jumlah penerimaan pajak daerah tampak pada berkurangnya pemasukan di sektor perhotelan sebesar 50% dan hiburan sebesar 356%.

Kabupaten Sukoharjo tahun 2018–2022, rasio efisiensi selama lima tahun terakhir menunjukkan hasil di bawah 5%. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Pasal 76 yang menyatakan bahwa upah pungut tidak boleh melebihi 5%. Oleh karena itu, semakin rendah rasionya, semakin efisien.

4. Derajat Kontribusi BUMD

Jika hasilnya melebihi 0%, itu menunjukkan pendapatan daerah sudah mendapat kontribusi dari perusahaan daerah.

Sebagai hasil dari penelitian, nilai rasio derajat kontribusi BUMD Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. BUMD yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, meminta pejabat BUMD di Kabupaten Sukoharjo mengubah cara berpikir yang monoton dengan menghasilkan ide baru dan inovatif agar perusahaan mampu keluar dari zona nyaman dan memungkinkan mereka menjadi lebih kompetitif dan lebih produktif sehingga perekonomian Kabupaten Sukoharjo dapat lebih meningkat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1. Analisis Varians dan Efisiensi Belanja Daerah

Analisis varians belanja menilai perbedaan antara pengeluaran yang dilakukan dan anggaran yang ditetapkan. Jika terjadi defisit (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan), keuangan pemerintah daerah dinilai baik dan efektif. Apabila terjadi surplus, mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang direncanakan, kinerja keuangan tidak efisien.

Kinerja Keuangan Belanja Kabupaten Sukoharjo menurut analisis varians belanja daerah dianggap baik karena anggaran belanja melebihi realisasi belanja, hal ini sejalan dengan teori keagenan di mana pemerintah daerah memanfaatkan dengan baik anggaran yang dimilikinya. Diatur dalam PMK no. 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga bahwasanya pada tahun 2018 hingga 2021 penyerapan anggaran Kabupaten Sukoharjo tergolong rendah karena kurang dari 90% dan pada tahun 2022 termasuk ke dalam kategori sedang. Kategori rendah ini menggambarkan adanya kelemahan dalam hal perencanaan anggaran, adanya pandemi juga turut mempengaruhi tingkat realisasi penyerapan anggaran. Namun melihat adanya penyerapan yang lebih baik di tahun 2022 menunjukkan peningkatan kinerja dapat menghemat dan menyerap anggaran dengan lebih baik, yang menunjukkan bahwa

anggaran digunakan secara efisien. Realisasi belanja lebih kecil dibandingkan anggaran menunjukkan bahwa anggaran belanja Kabupaten Sukoharjo termasuk ke dalam varians yang menguntungkan (*favourable variance*).

2. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah membantu dalam menilai pertumbuhan belanja setiap tahunnya, umumnya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Ini dapat disebabkan oleh perubahan dalam faktor ekonomi makro seperti inflasi, nilai tukar mata uang rupiah, dan lainnya.

Hasil perhitungan pertumbuhan belanja, yang dapat dianalisis bahwa pertumbuhan belanja mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif selama tahun 2018-2022. Pertumbuhan realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 negatif (turun) sebanyak 1.94% dibandingkan tahun 2020, hal ini didasarkan dengan adanya pengurangan dalam hal belanja modal, ini terjadi sebab saat pandemi pembangunan gedung baru ataupun pembangunan infrastruktur lainnya masih memungkinkan ditunda tahun berikutnya dan sebaiknya berfokus untuk kesehatan masyarakat. Hal serupa juga terjadi di tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan negatif (turun) sebesar 2.27%, penurunan realisasi belanja paling banyak ada pada belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 Kabupaten Sukoharjo masih berfokus

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pada kesejahteraan masyarakat setelah pandemi dan masih dalam fase berjaga-jaga apabila ada kejadian keadaan darurat terkait dengan pandemi.

3. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Kesesuaian Belanja Daerah berguna mengevaluasi proporsi dan keseimbangan antara berbagai jenis belanja. Belanja operasional adalah istilah yang mengacu pada jumlah manfaat yang dihabiskan dalam satu tahun anggaran.

Biaya Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2018–2022 meningkat, menurut perhitungan Analisis Keserasian Belanja Daerah. Dimulai pada 2018 dengan 57.35%. Kemudian naik menjadi 58.05% pada 2019, pada tahun ini jenis belanja yang meningkat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Selanjutnya menjadi 62.30% dengan kenaikan pada belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada 2020. Lalu kembali naik menjadi 70.48% dengan peningkatan pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada 2021, dan kembali naik lagi pada 2022 pada bagian belanja barang dan jasa, belanja subsidi, dan belanja hibah menjadi 72.29%.

Belanja Modal Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dan penurunan. Dimulai pada 2018 dengan 18.95%, tetapi turun menjadi 16.58% pada 2019, realisasi belanja di 2 tahun ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun berikutnya, hal ini terjadi karena di tahun 2018-2019 sedang terjadi

pembangunan Gedung Menara Wijaya dengan anggaran senilai Rp120,8 miliar. Tahun 2020 turun menjadi 11.52%, pada tahun ini anggaran menurun drastis karena dipangkas untuk penanganan pandemi Covid-19. Tahun berikutnya yaitu 2021 mengalami kenaikan menjadi 13.59% karena adanya proyek lanjutan pengerjaan Jalan Lingkar Timur, dan kembali turun menjadi 10.80% di tahun 2022. Di tahun 2022 porsi belanja yang berkurang di antaranya belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, serta belanja gedung dan bangunan (Suharsih, 2024). Dengan mempertimbangkan deskripsi dan perhitungan yang ada, mayoritas dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo digunakan untuk keperluan operasional. Akibatnya, proporsi keperluan untuk investasi atau belanja modal relatif kecil, dan rasio belanja operasional masih jauh lebih tinggi daripada rasio belanja modal. Pengeluaran yang signifikan untuk belanja operasional, terutama untuk biaya pegawai, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo lebih cenderung mengalokasikan dana untuk aktivitas pemerintahan biasa daripada memberikan sumber daya untuk pembangunan wilayah. Belanja modal untuk pengembangan Kabupaten Sukoharjo masih terbatas karena fokus utama tetap pada pemenuhan kebutuhan operasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam konteks evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kabupaten Sukoharjo, ditemukan beberapa temuan yang signifikan. Salah satunya adalah peningkatan setiap tahun pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dipicu oleh peningkatan target penerimaan pajak daerah. Namun, jika dilihat dari pertumbuhan pendapatan, tahun 2020 dan 2022 menghasilkan angka negatif karena dampak pandemi, yang menyebabkan penutupan semua tempat wisata yang dikelola dan mengakibatkan sektor pariwisata tidak berkontribusi pada penerimaan PAD. Hasil desentralisasi di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan peningkatan setiap tahun, mencerminkan peningkatan kemampuan untuk membiayai pembangunan seiring dengan peningkatan penerimaan PAD. Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan rasio desentralisasi, dapat dikategorikan sebagai sedang, artinya dianggap memiliki kinerja yang dimiliki memadai dalam pengelolaan realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah. Meskipun tingkat ketergantungan Kabupaten Sukoharjo terhadap pusat mengalami penurunan setiap tahunnya, rasio ketergantungan daerah masih tergolong tinggi. Meskipun tingkat ketergantungan tinggi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo dievaluasi positif karena efisiensi penggunaan biaya dalam mencapai tujuan. Perusahaan daerah juga memberikan kontribusi dalam mendukung pendapatan daerah. Efisiensi belanja daerah, terutama dalam penghematan anggaran, dinilai cukup baik. Peningkatan kinerja tercermin dalam penyerapan anggaran yang semakin membaik.

Namun, proporsi belanja APBD Kabupaten Sukoharjo selama 2018-2022 masih lebih fokus pada belanja operasional daripada belanja modal. Konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan pegawai atau perangkat pemerintah lainnya terungkap dari proporsi yang tidak seimbang. Pengurangan anggaran belanja modal untuk penanganan pandemi juga menjadi salah satu faktor rendahnya rasio belanja modal.

Sebagai respons terhadap masalah tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo telah mengambil tindakan konkret. Fokus utama pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam anggaran tahun 2023 adalah pada pengembangan infrastruktur. Beberapa proyek infrastruktur yang termasuk dalam rencana ini mencakup pembangunan GOR, Taman Budaya Sukoharjo, gedung parkir, taman plaza, pembangunan jembatan, dan pembangunan jalan berkala di berbagai daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo mengarahkan perhatian pada pembangunan infrastruktur setelah masa pandemi dengan tujuan agar infrastruktur tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perbaikan dalam desentralisasi fiskal agar kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah semakin tinggi, kemudian dalam hal ketergantungan daerah juga perlu diperhatikan, serta peningkatan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan proyek pembangunan secara tepat waktu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara langsung

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

oleh masyarakat, yang menghasilkan peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Saran

1. Untuk Peneliti

Diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan analisis keuangan pemerintah daerah dengan lebih detail dalam penelitian lanjutan. Diharapkan bahwa penggunaan rasio yang lebih beragam dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang situasi keuangan sebenarnya di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian mendatang sebaiknya memperluas rentang waktu yang diamati, bukan hanya terbatas pada periode 5 tahun. Disarankan agar peneliti mengambil cakupan wilayah yang lebih luas daripada hanya satu kabupaten untuk memperluas generalisasi hasil penelitian.

2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih lanjut dengan menemukan peluang baru dan meningkatkan sumber daya yang ada. Ada beberapa cara yang dapat digunakan, seperti:

a. Menegakkan disiplin dalam menetapkan kewajiban pajak bagi wajib pajak, disiplin dalam proses pemungutan pajak terhadap wajib pajak, administrasi yang tepat, dan penyetoran yang tepat.

b. Mengoptimalkan penggunaan pajak dan retribusi lokal sesuai dengan kemungkinan yang ada, sesuai dengan regulasi yang sah.

c. Mengawasi dan mengendalikan secara sistematis dan konsisten untuk mencegah ke-tidak-konsisten-an dalam pelaksanaan PAD oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo harus mengevaluasi kondisi dan potensi yang ada. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat yang semakin meningkat. Diharapkan peningkatan PAD tidak menghambat investor untuk menanamkan modal. Pemerintah sebaiknya memberikan insentif kepada para investor yang berniat menginvestasikan dana mereka di

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Teori, Konsep dan Indikator* (vii). Zanafa Publishing.
- Ardiyos. (2016). *Kamus Standar Akuntansi*. Citra Harta Prima.
- Bisma, I. D. G., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Ganec Swara*, 4(3), 75–86.
- Divianta, D. (2023). *10 Proyek Strategis Sukoharjo, Bupati: Utamakan Infrastruktur karena Penting*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/regional/read/5219039/10-proyek-strategis-sukoharjo-bupati-utamakan-infrastruktur-karena-penting>
- Fahmi, I. (2011). Pengantar Manajemen Keuangan, Teori dan Soal Jawab, cetakan kesatu. In *Penerbit: Alfabeta, Bandung: Vols. xvi, 452 h* (Issue Bandung : Alfabeta).
- Hakim, M. F. (2018). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2010-2016. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 1.
- Halim, C. (2020). Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan, Dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Timur. *Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*, 120.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kusuma, A. P. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Setelah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Sukoharjo. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/32105%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/32105/9/02>. Naskah publikasi.pdf
- Lasminingsih. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Agro Media Pustaka.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. http://slims.ip-dynamic.com/library/index.php?p=show_detail&id=12059%0Ahttp://slims.ip-dynamic.com/library/lib/phpthumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/B150717.jpg.jpg
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mantovani, C. (2024). *Sedih, 2 Tahun Pemkab Sukoharjo Tak Peroleh PAD dari Sektor Pariwisata*. Soloraya Solopos. <https://soloraya.solopos.com/sed>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- ih-2-tahun-pemkab-sukoharjo-tak-peroleh-pada-dari-sektor-pariwisata-1237290
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Marhawati. (2022). *Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening di Rumah Sakit Jala Ammari Makassar*.
- Meiliana, I. (2022). *Analisis Rencana Dan Realisasi Anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal pada RSAU dr. Dody Sardjoto*. 8(002), 236–247.
- Puspitasari, ¹ Elfayang Rizky Ayu, & Rohman, A. (2014). ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN BLORA TAHUN 2009-2013. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, Volume 3 N*, 15.
- Putri, M. N. (2024). *Realisasi Pendapatan Pajak 2022 di Sukoharjo Naik 16,91%*. Soloraya Solopos. <https://soloraya.solopos.com/realisasi-pendapatan-pajak-2022-di-sukoharjo-naik-1691-1494378>
- Rahmayati, A. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. 1(1), 40–54.
- Rakadewa, V. A. (2022). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. S1 Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Rudiyanto, M. (2015). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN SERTA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi pada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Banten)*. *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Saputra, D. W. (2023). *Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. *Ipdn*, 282.
- Setiawati, N. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2019*. *Skripsi Universitas Sebelas Maret*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Bandung : Alfabeta, 2014. <https://opac.perpusnas.go.id/DetaiOpac.aspx?id=911046>
- Suharsih. (2024). *Jejak Proyek Infrastruktur Sukoharjo Era Wardoyo: Pasar Ir Soekarno Hingga Menara Wijaya*. Soloraya Solopos. <https://soloraya.solopos.com/jejak-proyek-infrastruktur->

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sukoharjo-era-wardoyo-pasar-ir-soekarno-hingga-menara-wijaya-1108600

Tumangkeng, S. (2018). Analisis Potensi Ekonomi Di Sektor Dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(1), 12.

Wicaksono, R. B. E. (2024). *Gara-Gara Pandemi Covid-19, Target PAD Sukoharjo Terancam Mawut*. Soloraya Solopos. <https://soloraya.solopos.com/gara-gara-pandemi-covid-19-target-pad-sukoharjo-terancam-mawut-1062296>

Wijaya, A. A. R. (2022). *TINJAUAN TERHADAP REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTAENG SEBAGAI STRATEGI PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANTAENG*. KTTA. <http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/404>

Yuesti, A., Dewi, N. L. P. S., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Noah Aletheia.

Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)*, 7(1), 11–21.